

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan di era globalisasi saat ini terus mengedepankan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga memaksa berbagai profesi supaya beradaptasi menyesuaikan perkembangan tersebut, dimana profesi akuntansi harus mampu menyesuaikan diri dengan ilmu dan teknologi yang kian berkembang. Perkembangan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi laporan keuangan (Yuliarti, 2017). Pengungkapan informasi yang berkualitas telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting Standards Board*) didalam 7 Pernyataan Konsep Akuntansi Keuangan (*Statement of Financial Accounting Concepts*) Nomor 2 yaitu informasi yang relevan, dapat dipahami, reliabilitas, konsistensi, dan komparabilitas (Hery, 2017 hlm. 43). Saat ini, di Indonesia, banyak perusahaan menyadari pentingnya pengungkapan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, materialitas, dan konservatif, untuk mewujudkan hal tersebut perusahaan melakukan salah satu usaha yaitu dengan bersikap lebih transparan dalam menyajikan informasi perusahaannya, dengan tujuan memudahkan para pemakai informasi dalam pengambilan keputusan (Nguyen et al., 2017). Perusahaan dapat bersikap lebih transparan dengan mengungkapkan informasi untuk membatasi persepsi negatif investor, mengurangi ketidakpastian, dan dengan demikian menciptakan kesadaran tentang prospek masa depan perusahaan yang dapat membuat perusahaan tumbuh, berkembang dan terus meningkat (Chegini et al., 2016).

Laporan tahunan adalah salah satu dari beberapa informasi wajib yang harus dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak pengelola dalam mengelola perusahaan serta sebagai sarana informasi bagi berbagai pihak diluar pengelola untuk mengetahui kondisi perusahaan (Mubarok dkk, 2018). Kualitas informasi laporan tahunan yang disajikan perusahaan dapat dilihat dari luasnya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan (Poluan & Nugroho, 2015). Laporan tahunan perusahaan merupakan sumber informasi bagi pihak luar manajemen

salah satunya yaitu investor untuk dimanfaatkan sebagai sarana membantu dalam proses pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi di pasar modal (Maharani & Budiasih, 2016). Maka dari itu, laporan tahunan perusahaan semestinya menyediakan informasi yang cukup relevan dalam buku (Yadiati, 2007 hlm. 58) disebutkan yaitu informasi yang tepat waktu (*timeliness*), memiliki nilai peramalan (*predictiive value*), nilai umpan baliik (*fedback value*), serta informasi yang bisa diandalkan memiliki ciri-ciri seperti dapat diuji kebenarannya, menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dan informasi yang disajikan tidak memihak. Informasi yang berkualitas harus dapat diperbandingkan dengan cirinya yaitu terkandung konsistensi. Dalam mengungkapkan informasi, hanya informasi yang material saja yang disajikan dan bersikap hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian suatu bisnis atau bersifat konservatif (Ha et al., 2019). Pengungkapan wajib serta pengungkapan sukarela secara garis besar adalah dua jenis pengungkapan informasi yang terdapat didalam laporan tahunan perusahaan (Silaban dkk., 2015).

Pengungkapan informasi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, seperti kebijakan-kebijakan baru yang diterbitkan oleh lembaga berwenang yaitu Dewan Standar Akuntansii Keuangan (DSAK) sebagaimana telah diterbitkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib pada perusahaan *go public* ditetapkan pada peraturan nomor 29/pojk.04/2016 terkait laporan tahunan pada perusahaan publik yang ditetapkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan yang dimaksud dengan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang berasal dari keputusan bebas manajemen organisasi atau entitas untuk menyajikan informasi atau uraian ringkas keuangan dan informasi entitas lainnya yang dipandang cukup dibutuhkan atau relevan untuk pengambilan keputusan oleh pemakai laporan tersebut (Hidayat, 2017). Pengungkapan sukarela yaitu ketika perusahaan mengungkapkan informasi tambahan di luar laporan tahunan, seperti aturan manajemen dan laporan audit (Nie et al., 2016). Pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan mengambil peran penting dalam proses transparansi, hal ini menjadi kondisi mendasar untuk mempertahankan kepercayaan publik (Carvalho et al., 2017). Setiap perusahaan memiliki perbedaan tingkat atau luas penyajian

informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunannya (Azaria & Achyani, 2015).

Namun demikian, dalam dinamika perusahaan terkait informasi untuk disajikan harus memenuhi unsur sebagai informasi yang berkualitas. Salah satu BUMN yaitu PT. PLN (Persero) tersandung kasus kurang transparansi terkait penurunan laba 2016, dimana PT. PLN (Persero) menyatakan alasan penurunan yang terjadi pada laba bersih 2016 karena keikutsertaan perusahaan dalam tax amnesty. Dengan alasan tersebut PLN justru dinilai tidak transparan mengenai sebab penurunan laba bersih yang sebenarnya. Menurut Ferdinand selaku Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) mengatakan bahwa laba bersih PLN seharusnya tidak menurun. Hal ini disebabkan oleh laporan penjualan PLN yang menunjukkan peningkatan. Selain itu, pada saat yang bersamaan, subsidi bagi pelanggan secara bertahap mulai dikurangi. Maka dalam konteks ini, Ferdinand menduga, penurunan laba bersih PLN yang signifikan tersebut disebabkan karena terpakai untuk proyek 35 ribu MW. Sebab untuk menjalankan proyek tersebut, memaksa PLN untuk mengeluarkan dana terlebih dahulu. Melihat hal tersebut Ferdinand meminta agar PLN hanya fokus pada proyek 35 ribu MW, yaitu untuk membangun jaringan distribusi dan transmisi pada proyek tersebut, dimana PLN akan membutuhkan dana sebesar Rp 300 triliun. Selama 2016, laba bersih PLN memang anjlok drastis, yakni 32,6% dibandingkan 2015. Pada 2016 PLN hanya meraup laba bersih sebesar Rp10,5 triliun. Angka tersebut jauh di bawah laba bersih 2015, yaitu Rp 15,6 triliun. Selain permasalahan transparansi dari kasus PT. PLN (Persero) terdapat permasalahan lain yaitu Sejumlah kalangan menilai pengelolaan utang pemerintah yang sudah mencapai 4.253 triliun rupiah per Juli 2018 tidak transparan. Sebab, setiap tahun pemerintah cenderung hanya mengumumkan penambahan utang, namun tidak terbuka dalam penggunaannya (Prismono, 2017).

Selain kasus kurang transparansi mengenai laba, terdapat kasus kurang transparansi terkait utang pemerintah. Transparansi utang pemerintah jadi sorotan sebab pemerintah selama ini tidak transparan atas pengelolaan utang dan termasuk penggunaan dan kebutuhannya yang seharusnya merujuk Undang-Undang No.14 Tahun 2008 isinya mengenai Keterbukaan Informasi Publik Persoalan utang yang

dimiliki pemerintah pada tahun 2018 yang mencapai Rp 4.034,8 triliun pada Februari akhir terus menjadi sorotan publik. Sebab, pemerintah selama ini dianggap masih menutup-nutupi kondisi yang terjadi akibat pembengkakan utang ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Misbah Hasan selaku Deputy Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Dia justru khawatir terdapat utang pemerintah yang digunakan pada kegiatan belanja yang tidak memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas ekonomi nasional. Uchok Sky Khadafi selaku Direktur Center for Budget Analysis (CBA) berpendapat bahwa pemerintah tidak transparan dalam hal ini. Menurutnya, pernyataan pemerintah yang menyanggupi pengelolaan utang perlu dikritisi, sebab terdapat peningkatan risiko utang akibat melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Pemerintah seharusnya lebih transparan mengenai risiko-risiko yang timbul akibat peningkatan utang saat ini. Ketua Komisi Informasi Publik, Gede Narayana mengatakan setiap instansi pemerintah daerah dan pusat wajib membuat laporan kinerja serta memberikan akses informasi untuk masyarakat. Dia juga menekankan setiap badan publik seperti yang diatur UU Nomor 14/2018 harus menyediakan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan akurat. Menurutnya, semakin terbukanya pemerintah terhadap informasi publik justru semakin meningkatkan transparansi dan kualitas tata kelola pemerintahan (Rizki, 2018).

Jurnal terdahulu atau penelitian sebelumnya yang meneliti terkait dengan luas pengungkapan informasi laporan tahunan perusahaan menunjukkan hasil yang variatif atau berbeda-beda. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Prakoso & Dewinta (2019), Dang et al. (2019), Mubarak dkk (2018), Nguyen et al. (2017), Khairiah & Fuadi (2017), Chegini et al. (2016), Utama & Khafid (2015), Putri dkk. (2015), Anisma dkk. (2015), Wulandari & Laksito (2015), Fitriana & Prastiwi (2014), Indrayani & Chariri (2014), dan Sehar et al. (2013) menyimpulkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi yang disajikan entitas dalam laporan tahunannya. Namun penelitian Liza & Arza (2019), Ningsih (2018), dan Azaria & Achyani (2015) menyimpulkan bahwa profitabilitas hasilnya tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi laporan tahunan perusahaan. Mubarak dkk (2018) merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya bahwa sampel yang akan

digunakan sebaiknya bertambah atau lebih dari yang banyak dari sampel yang diteliti sebelumnya yaitu dengan memperluas cakupan menjadi seluruh entitas yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

Penelitian lainnya terhadap faktor lain memengaruhi luas pengungkapan atau penyajian informasi pada laporan tahunan entitas yaitu *Leverage*. Penelitian Ha et al. (2019), Nguyen et al. (2017), Chegini et al. (2016), Anisma dkk. (2015), Wulandari & Laksito (2015), Utama & Khafid (2015), Indrayani & Chariri (2014), Fitriana & Prastiwi (2014), dan Sehar et al. (2013) menyimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan atau penyajian informasi pada laporan tahunan entitas. Sementara hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Prakoso & Ayu Dewinta (2019), Dang et al. (2019), Ningsih (2018), Mubarak dkk (2018), Khairiah & Fuadi (2017), dan Putri dkk. (2015) menyimpulkan bahwa *Leverage* memiliki hasil yang tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi laporan tahunan perusahaan. Khairiah & Fuadi (2017) menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan lebih banyak variabel independen seperti rasio keuangan atau variabel yang dapat memengaruhi luas pengungkapan lainnya.

Tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan entitas juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Menurut jurnal terdahulu atau penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mubarak dkk (2018), Edison (2017), Utama & Khafid (2015), dan Silaban dkk (2015) menyimpulkan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan entitas. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Yuliarti (2017), Ardilla (2015), dan Poluan & Nugroho (2015) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan saham manajerial memiliki hasil yang tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan entitas. Poluan & Nugroho (2015) mengharapkan penelitian selanjutnya agar memperluas dan menambah jumlah sampel penelitian dan menyertakan atau menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi tingkat pengungkapan informasi seperti ukuran perusahaan, profitabilitas dan *Leverage*.

Selain itu terdapat konsep yang masih jarang diteliti yaitu pengaruh komite audit terhadap luas pengungkapan informasi laporan tahunan entitas *go public* di

bursa efek indonesia. Menurut beberapa penelitian atau jurnal terdahulu yaitu penelitian yang dilakukn oleh Fatmawati dkk., (2018), Silaban dkk. (2015), dan (Ardilla, 2015) menyimpulkan bahwa komite audit memiliki hasil yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela entitas. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Poluan & Nugroho (2015) menyimpulkan bahwa komite audit memiliki hasil yang tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan atau penyajian informasi sukarela dalam laporan tahunan entitas. Silaban dkk., (2015) memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar menambah kemungkinan adanya variabel lain yang memengaruhi luas pengungkapan seperti faktor-faktor keuangan yang lain dan tingkat kesibukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana laporan keuangan perusahaan sampel diaudit.

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa hasil-hasil penelitian tentang beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan entitas *go public* di bursa efek indonesia masih belum konsisten. Maka dari itu, penelitiaan ini bertujuan untuk menemukan bukti tentang beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan entitas *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Alasan peneliti menggunakan periode waktu tersebut karena laporan tahunan 2016-2018 tiap perusahaan relatif baru dapat diperoleh di *website* BEI. Beberapa faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu rasio profitabilitas, *Leverage*, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terdapat pada variabel, cakupan sampel dan periode yang diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah rasio *Leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan pada perusahaan *go public*?
- b. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan pada perusahaan *go public*?

- c. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan pada perusahaan *go public*?
- d. Apakah komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan Pada perusahaan *go public*?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Mengetahui secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap luas pengungkapan informasi laporan tahunan perusahaan *go public*;
- b. Mengetahui secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap terhadap luas pengungkapan informasi laporan tahunan perusahaan *go public*.
- c. Mengetahui secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan informasi laporan tahunan perusahaan *go public*.
- d. Mengetahui secara empiris pengaruh komite audit terhadap luas pengungkapan informasi laporan tahunan perusahaan *go public*.

1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan kontribusi atau tambahan referensi pada pengembangan teori mengenai beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan informasi pada laporan tahunan entitas.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi pihak manajemen, dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan entitas;

- 2) Bagi pihak non manajemen atau pihak diluar entitas seperti investor dan kreditur, dapat dijadikan sebagai sarana pertimbangan dalam membuat keputusan berinvestasi dengan perusahaan *go public*;
- 3) Bagi pihak akademisi, dapat digunakan sebagai bahan yang membantu untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan entitas.